

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Khoirudin (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh *Corporate Governance* dan Pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Perbankan Syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris terbukti memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic social reporting* pada perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan ukuran dewan pengawas syariah tidak terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic social reporting* pada perbankan syariah di Indonesia.

Gestari (2014) melakukan penelitian tentang Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Profitabilitas terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris dan frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Sedangkan komposisi dewan komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, ukuran dewan pengawas syariah, frekuensi rapat dewan pengawas syariah, profitabilitas, dan kualitas auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Akbar (2015) melakukan penelitian tentang Analisis Pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berdasarkan *Islamic Social Reporting Indeks* pada Bank Syariah di Indonesia.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR, sedangkan ukuran dewan komisaris, rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, dan rapat komite audit terbukti tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Haribowo (2015) melakukan penelitian tentang Analisis Pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap *Corporate Social Responsibility*. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa *Islamic Corporate Governance* yang terdiri dari keberadaan dan keahlian dewan pengawas syariah, komposisi dewan komisaris, frekuensi jumlah rapat dewan komisaris, ukuran komite audit independen, komposisi komite audit independen, jumlah rapat komite audit, profitabilitas, dan likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*, sedangkan ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Namun secara bersama-sama semua variabel independen di atas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

Kurniawati dan Yaya (2017) melakukan penelitian tentang Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance*, Kinerja Keuangan, dan Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel ukuran dewan komisaris, profitabilitas, dan kinerja lingkungan berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Sedangkan variabel independen dewan komisaris dan komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

## 2.2 Tinjauan Pustaka

### 2.2.1 Tinjauan Teori

*Syariah Enterprise Theory* adalah *enterprise theory* yang telah diinternalisasi dengan nilai - nilai Islam guna menghasilkan teori yang lebih sesuai dengan prinsip kemanusiaan. *Enterprise theory* merupakan teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok *stakeholders* yang lebih luas (Meutia, 2010). Hal ini berdasarkan pada konsep *enterprise theory* menunjukkan bahwa kekuasaan ekonomi tidak lagi berada disatu tangan (*shareholders*), melainkan berada pada banyak tangan (*stakeholders*). Oleh karena itu, *enterprise theory* ini lebih tepat diterapkan pada suatu perusahaan yang didasarkan pada nilai - nilai syariah.

*Corporate Social Responsibility* menurut sudut pandang islam terdiri dari konsep zakat, konsep keadilan, konsep kemaslahatan, konsep tanggung jawab dan konsep kesejahteraan umum (falah). Kemudian konsep tersebut terbentuk menjadi *Syariah Enterprise Theory*. Konsep pertama mendorong kepada pemahaman bahwa didalam harta kita sebenarnya tersimpan hak orang lain. Pemahaman ini tentu membawa perubahan penting dalam mendistribusikan kekayaan (bagi hasil) berdasarkan kontribusi para partisipan, yaitu partisipan yang memberikan kontribusi berupa keuangan maupun keterampilan.

Berbanding lurus dengan semakin meningkatnya pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, maka kebutuhan perusahaan untuk dapat mengungkapkan lebih luas lagi mengenai item-item pengungkapan tanggung jawab sosial berbasis syariah juga meningkat. Salah satu cara menilai pelaporan perusahaan mengenai

tanggung jawab sosial perusahaan berbentuk syariah adalah dengan menggunakan indeks *Islamic Social Reporting* (ISR). Dari indeks yang diungkapkan dalam ISR dapat menunjukkan aspek mengenai kondisi internal maupun eksternal perusahaan yang terfokus pada pelaporan sosial perusahaan. Indeks ISR dapat dibagi menjadi enam tema pengungkapan menurut (Othman,*et.al*, 2010) yang berisi:

a. Pendanaan dan Investasi (*Finance and Investment*)

Dalam dunia perbankan syariah ada beberapa pos keuangan yang tidak diperbolehkan ada dalam operasional perbankan, seperti riba. Pos-pos tersebut apabila muncul dalam kegiatan operasional bank maka harus diungkapkan secara jelas. Kegiatan yang mengandung riba dilarang dalam Islam, sebagaimana ditegaskan Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 278-279. Salah satu contoh riba yang terdapat di dunia perbankan adalah pendapatan dan beban bunga. Adapun pos keuangan lain yang harus disajikan secara jelas dalam tema pendanaan dan investasi ini adalah kegiatan yang mengandung gharar (*hedging, future on delivery trading margin trading, arbitrage baikspot maupun forward, short selling, pure swap, warrant*), kebijakan zakat, kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan penghapusan piutang, kegiatan investasi, dan proyek pembiayaan yang dilakukan.

b. Produk dan Jasa (*Products and Services*)

Secara umum tema ini harus mampu menjelaskan mengenai status dari produk dan jasa yang ditawarkan oleh perbankan. Artinya produk dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen harus berstatus halal, mengingat bahwa bank yang menawarkan adalah bank syariah. Adapun yang harus

dijelaskan dalam tema ini meliputi pernyataan dari Dewan Pengawas Syariah terhadap kehalalan produk dan jasa baru, jenis dan definisi setiap produk, dan pelayanan atas keluhan nasabah (bentuk, jumlah keluhan, dan penyelesaian).

c. Karyawan (*Employees*)

Tema ini menjelaskan bagaimana perusahaan memperlakukan karyawan dari konsep etika amanah dan keadilan. Kemudian apakah karyawan diperlakukan secara wajar menurut informasi yang diungkapkan perusahaan melalui *annual report* yang disajikan. Adapun yang menjadi kriteria dalam tema ini adalah jumlah karyawan, jam kerja, hari libur, tunjangan karyawan, kebijakan remunerasi, pendidikan dan pelatihan karyawan, kesamaan peluang bagi seluruh karyawan, apresiasi terhadap karyawan berprestasi, kesehatan dan keselamatan karyawan, keterlibatan karyawan di perusahaan, adanya tempat ibadah yang memadai, adanya waktu ibadah atau kegiatan religi yang diadakan perusahaan, dan aspek kesejahteraan karyawan.

d. Masyarakat (*Community Involvement*)

Tema ini menjelaskan mengenai pentingnya bagi perusahaan untuk saling berbagi dan meringankan beban antar sesama. Bentuk dari saling berbagi dan tolong-menolong dari perusahaan dapat dituangkan dalam bentuk sedekah atau donasi, wakaf, *qard hasan* (pinjaman kebajikan), sukarelawan dari kalangan karyawan, pemberian beasiswa kepada sekolah-sekolah, pemberdayaan kerjasama lulusan sekolah atau kuliah (magang), pengembangan generasi muda, peningkatan kualitas hidup

masyarakat miskin, kegiatan peduli terhadap anak, kegiatan amal atau sosial (bantuan bencana alam, donor darah, sunatan masal, pengembangan infrastruktur, dan lain-lain), dan menyokong kegiatan-kegiatan (kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, pendidikan, dan keagamaan).

e. Lingkungan Hidup (*Environment*)

Tema ini menjelaskan mengenai konsep penekanan terhadap prinsip keseimbangan, kesederhanaan, dan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (Al-Qur’an surah Q.S Ar Ruum: 41). Adapun yang termasuk dalam tema lingkungan hidup ini meliputi konservasi lingkungan hidup, diadakannya kegiatan untuk mengurangi pemansan global (minimalisasi polusi, pengelolaan limbah, pengelolaan air bersih, dan lain-lain), pendidikan mengenai lingkungan hidup, penghargaan dibidang lingkungan hidup, dan sistem manajemen lingkungan hidup.

f. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Tema ini menjelaskan mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan syariat islam yang dijalankan perusahaan. Cakupan tema ini sangat luas, karena berhubungan dengan pemenuhan kewajiban terhadap seperangkat aturan hukum islam. Adapun yang mewakili dari tema ini yaitu status kepatuhan terhadap syariah (opini DPS), pendapatan dan

penggunaan dana non-halal, struktur kepemilikan saham, adanya kebijakan anti korupsi, kebijakan anti penyaluran dana kegiatan terorisme, perkara hukum, rincian nama dan profil, serta pelaksanaan tanggung jawabnya (Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah), dan adanya pengungkapan mengenai remunerasi (Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah).

### **2.2.2 Penjelasan Istilah Konseptual**

#### **a. *Islamic Social Reporting (ISR)***

ISR adalah standar pelaporan kinerja sosial bagi perusahaan - perusahaan yang berbasis syariah. Indeks ini juga menekankan pada keadilan sosial terkait mengenai lingkungan, hak minoritas, dan karyawan (Fitria dan Hartati, 2010). ISR membantu pengambilan keputusan bagi pihak muslim melainkan dan juga membantu perusahaan melakukan pemenuhan kewajiban terhadap Allah dan masyarakat.

#### **b. *Islamic Corporate Governance (ICG)***

ICG adalah suatu pedoman yang digunakan perusahaan dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan atas Islam. Hal-hal yang dijelaskan dalam praktek ICG meliputi semua hal yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Dari sekian banyak indikator yang ada, maka diambil indikator yang paling sesuai yaitu persentase kehadiran rapat dewan komisaris, persentase kehadiran rapat dewan pengawas syariah, dan persentase kehadiran rapat komite audit.

c. Persentase Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris yaitu jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan (Sembiring, 2005). Semakin besar ukuran dewan komisaris, maka pengawasan akan semakin baik. Dengan pengawasan yang baik, maka diharapkan pengungkapan *Islamic social reporting* akan semakin luas karena dapat meminimalisir informasi yang dapat disembunyikan oleh manajemen.

Rapat dewan komisaris merupakan media bagi dewan komisaris dalam mengawasi kinerja perusahaan. Frekuensi rapat dewan komisaris merupakan jumlah atau banyaknya rapat yang telah dilaksanakan oleh dewan komisaris dalam satu tahun atau satu periode pelaporan. Semakin banyak rapat yang dilakukan maka pengawasan terhadap kinerja dewan direksi akan semakin ketat. Menurut peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009, rapat dewan komisaris dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam 2 bulan.

Dari kedua indikator tersebut dapat digabungkan menjadi persentase kehadiran rapat dewan komisaris. Persentase kehadiran rapat dewan komisaris merupakan jumlah rata-rata dari persentase kehadiran rapat tiap anggota dewan komisaris. Penggabungan ini dirasa tepat karena menunjukkan seberapa aktif tiap anggota dewan komisaris mengawasi perusahaan melalui rapat anggota dewan komisaris.

d. Persentase Kehadiran Rapat Dewan Pengawas Syariah

Ukuran dewan pengawas syariah adalah jumlah dari anggota dewan pengawas syariah dalam suatu perusahaan. DPS mempunyai peran dalam pengungkapan ISR perbankan syariah. Hal ini karena DPS mempunyai



wewenang mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap prinsip syariah, antara lain mengawasi kegiatan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah yang bisa diakui sebagai bentuk ISR perusahaan.

Frekuensi rapat dewan pengawas syariah merupakan jumlah atau banyaknya rapat yang telah dilaksanakan oleh dewan pengawas syariah dan dewan direksi dalam satu tahun atau satu periode pelaporan. Rapat dewan pengawas syariah merupakan media yang digunakan oleh dewan pengawas syariah untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah adalah memberi nasihat dan saran kepada dewan direksi serta mengawasi penerapan unsur syariah yang digunakan dalam operasional perusahaan. Menurut peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009, rapat dewan pengawas syariah dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 bulan.

Dari kedua indikator tersebut dapat digabungkan menjadi persentase kehadiran rapat dewan pengawas syariah. Persentase kehadiran rapat dewan pengawas syariah adalah jumlah rata-rata dari persentase kehadiran rapat tiap anggota dewan pengawas syariah. Penggabungan ini dirasa tepat karena menunjukkan seberapa aktif tiap anggota dewan pengawas syariah mengawasi perusahaan melalui rapat anggota dewan pengawas syariah.

e. Persentase Kehadiran Rapat Komite Audit

Ukuran komite audit merupakan jumlah anggota komite audit dalam perusahaan. Menurut pedoman Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKG), komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan anggotanya yang terdiri dari komisaris serta pihak luar yang

independen dan memiliki keahlian, pengalaman dan kualitas lain yang diperlukan. Ukuran komite audit adalah jumlah komite audit yang ada pada perusahaan. Komite audit memiliki tugas membantu dewan komisaris dalam hal pengawasan secara menyeluruh. Semakin banyak jumlah komite audit perusahaan baik internal maupun eksternal, maka pengawasan menyeluruh dalam perusahaan akan semakin baik. Anggota komite audit merupakan seorang dari seorang komisaris independen.

Frekuensi rapat komite audit merupakan jumlah atau banyaknya rapat yang telah dilaksanakan oleh komite audit dan dewan komisaris dalam satu tahun atau satu periode pelaporan. Dari kedua indikator tersebut dapat digabungkan menjadi persentase kehadiran rapat komite audit. Persentase kehadiran rapat komite audit merupakan jumlah rata-rata dari persentase kehadiran rapat tiap anggota komite audit. Dari persentase kehadiran rapat komite audit dapat dilihat seberapa aktif tiap anggota komite audit mengawasi perusahaan melalui rapat anggota komite audit.

f. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas (Jumingan, 2006). Pada penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan adalah likuiditas, *leverage*, dan profitabilitas.

g. Likuiditas

Likuiditas merupakan ukuran yang digunakan perusahaan dalam menilai kemampuan pemenuhan kewajiban jangka pendek perusahaan. Likuiditas dianggap penting dalam kegiatan operasi perusahaan karena berkaitan dengan komponen likuid perusahaan (kas, piutang, dan persediaan). Perusahaan dikatakan baik apabila likuiditas perusahaan dinilai tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Terlalu tinggi nilai rasio likuiditas bukan berarti menunjukkan indikasi baik, melainkan perusahaan dikatakan tidak mampu mengelola aset lancarnya dengan optimal.

h. *Leverage*

Rasio *Leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Hutang lebih dari 50% menunjukkan bahwa penguasaan aset perusahaan bersumber dari hutang, sedangkan sisanya adalah modal.

i. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan, profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan dapat dinilai melalui berbagai cara tergantung pada laba dan aktiva atau modal yang akan diperbandingkan satu dengan lainnya. Salah satunya adalah dengan ROE (*Return On Equity*). ROE menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari komposisi modal yang dipergunakan. ROE dipilih karena merupakan rasio profitabilitas yang dapat menggambarkan kemampuan menghasilkan laba

berdasarkan atas komposisi modal yang dimiliki perusahaan. ROE menunjukkan jumlah total modal perusahaan yang diperoleh dari pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Selain alasan di atas ROE juga merupakan rasio yang paling kompleks, menurut analisis *du pont* ROE mencakup semua rasio dalam profitabilitas, seperti ROA, *profit margin*, bahkan rasio modal saham ke total aset. Jadi penggunaan alat ukur ROE dirasa cocok karena menggambarkan semua komponen modal yang ada dalam perusahaan. Besarnya perhitungan pengembalian atas modal menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tersedia bagi para investor yang menanamkan modal di perusahaan.

### 2.3 Perumusan Hipotesis

#### 1. *Islamic Corporate Governance*

*Islamic Corporate Governance* bukanlah variabel yang dapat diukur secara langsung menggunakan satu jenis pengukuran saja, namun harus diukur menggunakan indikator-indikator penyusun variabel. Dalam *Islamic Corporate Governance* terdapat 3 indikator penyusun, yaitu:

- Persentase Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Semakin banyak jumlah dewan komisaris dan semakin sering dewan komisaris melakukan rapat dalam perusahaan maka semakin banyak kontribusi dan saran kepada pihak manajemen untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaannya yang lebih luas. Frekuensi rapat dewan komisaris dianggap penting dalam kaitannya dengan pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris, semakin sering rapat yang dilakukan oleh dewan direksi maka pengawasan atas kinerja dewan direksi akan semakin ketat.

- Persentase Kehadiran Rapat Dewan Pengawas Syariah

DPS memegang peranan penting dalam proses pengawasan di bank syariah. DPS mempunyai peran dalam pengungkapan ISR perbankan syariah. Hal ini karena DPS mempunyai wewenang mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap prinsip syariah, antara lain mengawasi kegiatan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah yang bisa diakui sebagai bentuk ISR perusahaan. Semakin banyak jumlah DPS dan semakin sering DPS melakukan rapat maka dapat meningkatkan level pengungkapan ISR. Frekuensi rapat dewan pengawas syariah memberikan dampak yang besar bagi pelaksanaan prinsip syariah dalam operasional perusahaan. Semakin sering rapat dewan pengawas syariah diadakan, maka pengawasan berkala terhadap pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana pada perusahaan dapat berjalan dengan optimal.

- Persentase Kehadiran Rapat Komite Audit

Komite audit memegang peran penting dalam perusahaan, tanggung jawabnya dalam operasional perusahaan meliputi: laporan keuangan, tata kelola perusahaan, dan pengawasan perusahaan terkait hal-hal yang memiliki potensi mengandung resiko. Semakin sering frekuensi rapat yang dilakukan oleh komite audit maka semakin baik pengawasan yang dilakukan kepada perusahaan.

Sejalan dengan penjelasan di atas, Chariri (2012) menyatakan hal yang sama bahwa *islamic corporate governance* berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

$H_1$  : *Islamic Corporate Governance* memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada bank syariah.

## 2. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan perusahaan merupakan indikator yang sering digunakan untuk melihat pertumbuhan dari suatu perusahaan. Suatu perusahaan dapat dikatakan selalu tumbuh dan berkembang jika kinerja keuangan perusahaan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan.

### - Likuiditas

Kegiatan operasional perbankan identik dengan arus keluar masuk kas yang tinggi, yang mengharuskan perusahaan bersifat likuid, artinya bila sewaktu-waktu nasabah memerlukan pencairan dana cepat maka bank dapat menyediakan dana tersebut.

### - Leverage

Perbankan adalah lembaga dengan tingkat utang yang tinggi. Dilihat dari sumber dana bank adalah dana dari nasabah dan investor, dana nasabah mempunyai karakteristik dana yang sedikit, namun jumlah nasabah banyak. Sedangkan investor memiliki dana yang besar, namun jumlah investor sedikit. Bila diakumulasi dana dari nasabah mempunyai proporsi yang lebih tinggi dengan persentase lebih dari 70% dibanding dengan dana investor.

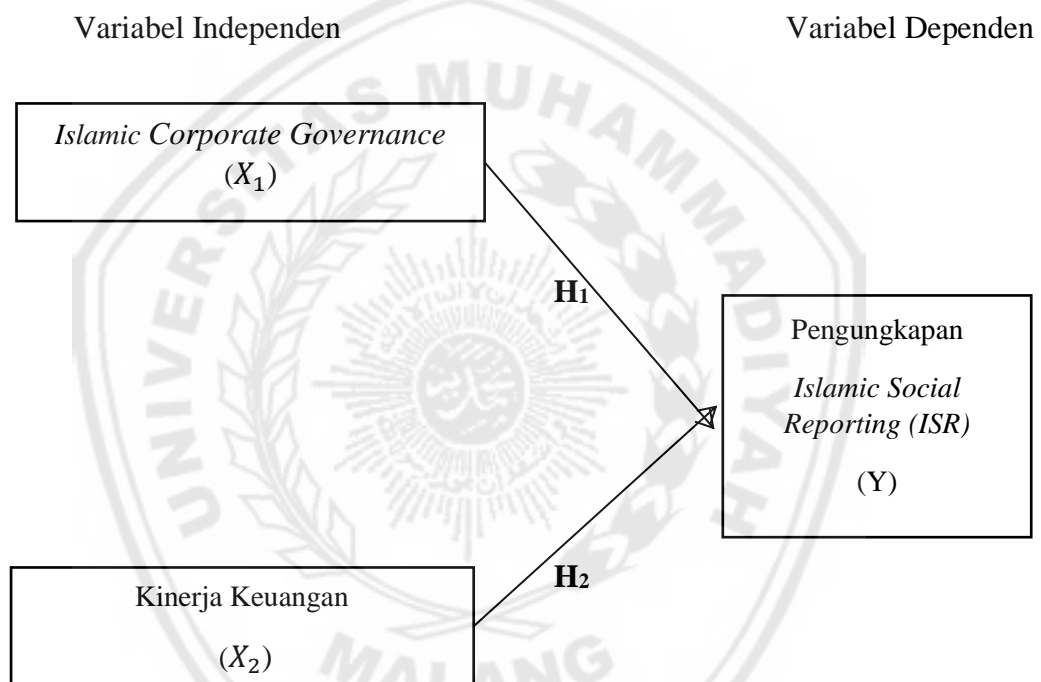
### - Profitabilitas

Perusahaan yang berada pada posisi menguntungkan akan cenderung melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas dalam laporan tahunannya. Oleh karena itu, penelitian ini menduga bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang lebih tinggi akan melakukan ISR secara lebih luas.

Berdasarkan penjelasan di atas dan didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mahardhika dkk (2017) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

H<sub>2</sub> : Kinerja Keuangan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada bank syariah.

## 2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

